

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak abad ke-7 Indonesia telah menjadi wilayah perdagangan penting dengan menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok dan India. Sebagai negara kepulauan yang memiliki peran penting dalam perdagangan, Indonesia mengoptimalkan perhubungan laut sebagai media penghubung dengan negara lain.

Hal ini dibuktikan dengan sejarah sebelum bangsa Indonesia masih menjadi kerajaan tradisional. Salah satu kerajaan maritim yang ada yaitu Kerajaan Sriwijaya menjadi salah satu kerajaan maritim terkuat di Asia Tenggara dengan daerah kekuasaan yang membentang dari Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.
(<http://id.wikipedia.org/wiki/indonesia>)

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.058 pulau. Yang secara geografis terletak diantara benua Asia dan Australia, serta diapit oleh Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Letak Negara Indonesia yang strategis menjadikan Indonesia mempunyai peranan penting dalam perdagangan di dunia.

Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan (2006), wilayah Indonesia mempunyai potensi sumber daya pesisir yang sangat besar, baik potensi hayati maupun non hayati. Potensi wilayah pesisir dan lautan Indonesia dipandang dari

segi fisik, terdiri dari Perairan Nusantara seluas 2,8 juta km², Laut Teritorial seluas 0,3 juta km². Perairan Nasional seluas 3,1 juta km², luas daratan sekitar 1,9 juta km², luas wilayah nasional 5,0 juta km², luas Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) sekitar 3,0 juta km², panjang garis pantai lebih dari 95.181 km dan jumlah pulau lebih dari 17.504 pulau. Menurut Nikijulw (2008), Indonesia dilimpahi Tuhan dengan sumber daya laut yang banyak dan luas. Dua pertiga wilayahnya adalah laut, memiliki lebih dari 17.000 pulau, 81.000 km² garis pantai, berbagai jenis ikan yang potensi lestariannya diperkirakan lebih dari 6 juta ton pertahun. Indonesia sebagai negara kepulauan, sebagai bangsa yang seharusnya dapat memanfaatkan dan mengandalkan sumber daya kelautan, khususnya sumber daya ikan, bagi kesejahteraan rakyatnya.

Di masa sekarang ini dimana era perdagangan bebas kian menjadi konsep ekonomi yang dianut oleh banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Perdagangan bebas dapat diartikan dengan penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya.

Dengan diterapkannya perdagangan bebas di Indonesia maka arus barang dari atau ke Indonesia akan meningkat tajam. Oleh karena itu, sarana transportasi yang efisien dan efektif sangat penting dalam rangka menciptakan biaya (*cost*) operasional angkutan pada tingkat minimum. Salah satu sarana transportasi yang sangat murah untuk menunjang kegiatan ekspor dan impor adalah transportasi melalui laut. Dengan demikian dibutuhkan pelabuhan sebagai tempat penghubung antara moda laut dengan moda darat.

Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan (2006), pembangunan kelautan Indonesia merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkesinambungan. Pembangunan kelautan Indonesia merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan wilayah perairan Indonesia sebagai wilayah kedaulatan dan yuridiksi nasional untuk di dayagunakan dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan dan ketahanan bangsa Indonesia. Salah satu faktor untuk mendukung pengelolaan kelautan secara maksimal adalah perlu pengembangan pelabuhan.

Menurut Badan Riset Kelautan dan Perikanan (2003), pembangunan pelabuhan perikanan yang hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan melalui pemberian kemudahan beraktifitas yang diharapkan pula akan memberikan *multiplier affect* dan sekaligus pusat pelaksana pengawasan sumber daya ikan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Berdasarkan pasal 1 butir 23 Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan dijelaskan bahwa Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Sedangkan pasal 41 disebutkan bahwa pemerintahan menyelenggarakan dan membina pelabuhan perikanan. Mengingat sampai saat

ini pembangunan pelabuhan perikanan sebagai prasarana perikanan telah banyak dibangun, maka pembinaanya dilakukan secara ganda yaitu meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana yang telah dibangun dan terus melanjutkan pembangunan di tempat-tempat lain yang strategis dan prospektif.

Menurut Lubis (2012) dan Murdiyanto (2003), Pelabuhan perikanan sangat menentukan pengembangan usaha perikanan tangkap karena kapal-kapal perikanan memerlukan tempat yang aman dan lancar untuk membongkar hasil tangkapannya serta untuk melakukan persiapan kembali melaut. Pelabuhan perikanan yang berfungsi dengan baik akan merupakan titik temu (*terminal point*) yang menguntungkan antara kegiatan ekonomi di laut dengan kegiatan ekonomi di darat.

Menurut Arso Martopo (2004), Sebagai bagian dari upaya mewujudkan keselamatan pelayaran dan perlindungan terhadap lingkungan laut, penataan alur pelayaran dan sarana bantu navigasi pelayaran merupakan fasilitas pokok dalam sistem kepelabuhanan yang dimaksudkan untuk memudahkan arus kunjungan kapal baik keluar atau masuk ke pelabuhan. Alur pelayaran sebagai akses untuk masuk dan keluar pelabuhan atau perairan yang dapat dilayari kapal, harus aman untuk dilayari dan lazimnya alur pelayaran ini dianak-pelampungi sebagai sarana bantu navigasi pelayaran.

Di dalam Peraturan Pemerintah RI No: 81 tahun 2000 tentang kenavigasian, diberikan pengertian sebagai berikut: alur pelayaran adalah bagian dari perairan yang alami maupun buatan, yang dari segi kedalaman, lebar dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari. Sarana Bantu

Navigasi Pelayaran (SBNP) adalah sarana yang dibangun atau terbentuk secara alami yang berada diluar kapal, yang berfungsi membantu navigator dalam menentukan posisi dan/atau haluan kapal serta memberitahukan bahaya dan/atau rintangan pelayaran untuk kepentingan keselamatan berlayar.

Navigasi adalah proses mengarahkan gerak kapal dari suatu titik ke titik yang lain dengan lancar dan dapat menghindari bahaya atau rintangan pelayaran agar dapat menyelesaikan perjalanan dengan selamat sesuai jadwal. Sedangkan sarana alat bantu navigasi pelayaran (SBNP) adalah alat diluar kapal yang dirancang untuk membantu navigator dalam menentukan posisi kapal arah yang aman atau untuk memperingatkan akan bahaya-bahaya atau rintangan pelayaran. Sedangkan fungsi SBNP diantaranya adalah untuk menandai alur pelayaran, menandai bahaya atau rintangan pelayaran serta menentukan posisi kapal.

Sementara itu, jenis-jenis SBNP yang lazim dipakai adalah sebagaimana berikut, Sarana Bantu Navigasi visual, Sarana Bantu Navigasi visual adalah Sarana Bantu Navigasi yang hasil kerjanya dapat di lihat dengan mata. Contoh: Menara suar (Mensu) bangunan menara yang dilengkapi dengan suar dan fasilitasnya, didirikan di pulau, di darat atau di air dan di jaga oleh penjaga menara suar (PMS). Rambu suar (Ramsu) bangunan menara yang dilengkapi dengan suar tanpa fasilitas, didirikan di pulau, di darat atau di air. Kapal-kapal yang dilengkapi dengan suar dan dilabuhkan, pada posisi tertentu. Pelampung suar (pelsu) pelampung yang dilengkapi dengan suar dan dilabuhkan di air, umumnya di alur pelayaran. Tanda siang rambu-rambu atau anak pelampung tanpa dilengkapi suar.

Sarana Bantu Navigasi/elektronik adalah Sarana Bantu Navigasi yang hasil kerjanya hanya dapat dilihat/dimengerti melalui alat elektronika. Contoh MWRB (*Medium Wave Radio Beacon*), RACON (Radar Beacon). Dapat disimpulkan bahwa pengertian sarana bantu navigasi pelayaran sangat luas, mencakup objek yang tetap atau terapung seperti mercusuar, pelampung suar, beacon, isyarat kabut, dan alat bantu elektronik seperti radio beacon, loran, dan omega. Bahkan puncak gunung, tanjung, menara air, dan radio tower dapat dipakai sebagai alat bantu penentuan posisi kapal. Dengan sarana bantu navigasi yang baik maka fungsi pelabuhan bagi kunjungan kapal yang masuk akan bisa optimal.

Menurut Murdiyanto (2004), Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi yang bersifat umum (*general function*). Fungsi umum merupakan fungsi yang terdapat pula pada pelabuhan lain (pelabuhan umum atau pelabuhan niaga yang bukan pelabuhan perikanan). Hal yang dimaksudkan dengan fungsi khusus dalam hal ini adalah fungsi-fungsi yang berkaitan dengan masalah perikanan yang memerlukan pelayanan khusus pula yang belum terlayani oleh adanya berbagai fasilitas umum. Contoh fungsi khusus pada pelabuhan perikanan misalnya fasilitas tempat pelelangan ikan, fasilitas untuk penanganan serta pengolahan ikan, dan sebagainya.

Menurut Natalia KD (2009), Berbagai fasilitas yang perlu dibangun untuk memenuhi fungsi umum suatu pelabuhan perikanan adalah sebagai berikut: jalan masuk yang aman, yang mempunyai kedalaman air yang cukup, serta mudah dilayari oleh kapal yang datang dari laut terbuka menuju ke pintu gerbang masuk pelabuhan, pintu atau gerbang pelabuhan dan saluran navigasi yang cukup aman

dan dalam, kolam air yang cukup luas dan kedalamannya serta terlindung dari gelombang dan arus yang kuat untuk keperluan kegiatan kapal di dalam pelabuhan, bantuan peralatan navigasi baik visual maupun elektronis untuk memandu kapal agar dapat melakukan manuver di dalam area pelabuhan dengan lebih mudah dan aman, bila di pandang perlu mendirikan bangunan penahan gelombang (*breakwater*) untuk mengurangi pengaruh atau memperkecil gelombang dan angin badai di jalan masuk dan Fasilitas Pelabuhan lainnya. Dermaga yang cukup panjang dan luasnya untuk melayani kapal yang berlabuh, fasilitas yang menyediakan bahan kebutuhan pelayaran seperti bahan bakar minyak, pelumas, air minum, listrik, sanitasi dan kebersihan, saluran pembuangan sisa kotoran dari kapal, penanggulangan sampah dan sistem pemadam kebakaran. Bangunan rumah dan perkantoran yang perlu untuk kelancaran dan pendayagunaan operasional pelabuhan. Area di bagian laut dan darat untuk perluasan dan pengembangan pelabuhan. Jalan raya atau jalan kereta api/lori yang cukup panjang untuk sistem transportasi dalam areal pelabuhan dan untuk hubungan dengan daerah lain di luar pelabuhan. Halaman tempat parkir yang cukup luas untuk kendaraan industri ataupun perorangan di dalam pelabuhan sehingga arus lalu lintas di kompleks pelabuhan dapat berjalan dengan lancar. Fasilitas perbaikan, reparasi, dan pemeliharaan kapal seperti *dock* dan perbengkelan umum untuk melayani permintaan sewaktu-waktu menurut Murdiyanto dalam penyediaan fasilitas di PPI Blanakan dan PPI Muara Ciasem.

Fungsi pelabuhan dari pengertian di atas, maka fungsi pokok pelabuhan yaitu sebagai tempat yang aman berlabuh kapal dan sebagai terminal transfer

barang dan penumpang. Pada dasarnya fungsi pelabuhan mempunyai arti yang luas, yaitu sebagai *interface*, *link gateway*, dan industri *entity*. Dalam menunjang berbagai fungsi tersebut peranan pelayanan jasa pelabuhan sangat penting dalam menunjang terselenggaranya angkutan laut di samping menunjang pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Dalam menunjang terselenggaranya angkutan laut dan pembangunan selain tersedianya fasilitas dan peralatan yang cukup, pelayanan jasa pelabuhan harus dilakukan dengan efektif dan efisien, artinya pelayanan sesuai obyek yang dilayani dengan mempergunakan teknik/metode yang canggih sehingga pelaksanaan bongkar muat dari kapal ke angkutan darat dan laut sebaiknya dapat dilakukan dengan cepat, lancar, aman, murah serta terjangkau secara efektif. Untuk terselenggaranya pelayanan di pelabuhan secara efektif dan efisien selain tersedianya fasilitas dan peralatan pelabuhan, sebagai penunjang terdapat jasa-jasa, isinya seperti alur pelayaran, rambu-rambu, stasiun radio pantai, pengamanan keselamatan pantai (Syahbandar), pengawasan cukai dan barang (bea dan cukai), karantina imigrasi, keamanan pelabuhan.

Dalam pertimbangan UU no 17 tahun 2008 mengenai Pelayaran bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan pelayaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara negara, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi kepentingan nasional dalam pasal 1 UU RI no 17 tahun 2008 mengenai Pelayaran memuat Keselamatan dan Keamanan Pelayaran

adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim. Serta keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Sedangkan didalam pasal 117 ayat disebutkan bahwa Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan, kelaiklautan kapal, kenavigasian. Di dalam ayat 2 kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi:

1. Keselamatan kapal
2. Pencegahan pencemaran dari kapal
3. Pengawakan kapal
4. Garis muat kapal dan pemuatan
5. Kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang
6. Status hukum kapal
7. Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal

Untuk menjamin keselamatan pelayaran sesuai amanat undang-undang tersebut serangkaian usaha dilakukan sebagaimana amanat pasal 119. Pemerintah melakukan perencanaan, pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan,

dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran sesuai dengan ketentuan internasional, serta menetapkan alur pelayaran dan perairan pandu. Yang diwujudkan kedalam pembangunan pelabuhan yang modern, Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan kapal yang beroperasi di pelabuhan, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang serta keselamatan dan keamanan pelabuhan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 45/PERMEN-KP/2014 Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Pelabuhan Pekalongan semula merupakan pelabuhan umum. Pelabuhan Pekalongan semula merupakan pelabuhan umum. Terhitung sejak bulan Desember 1974 pengelolaan dan asetnya diserahkan kepada Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perikanan dan diubah statusnya menjadi Pelabuhan Khusus Perikanan.

Berdasarkan SK Menteri Pertanian no. 310/Kpts/5/1978 tanggal 25 Mei 1978, Pelabuhan Perikanan ini resmi menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan sebagai UPT Direktorat Jenderal Perikanan Departemen Pertanian dan mulai 1 Mei 2001, PPN Pekalongan merupakan UPT Direktorat Jenderal

Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai salah satu pelabuhan perikanan tertua di Indonesia, PPN Pekalongan sejak dulu telah memiliki kontribusi besar terhadap perikanan tangkap dan pernah menjadi salah satu tempat pendaratan ikan terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara.

Di dalam menjalankan fungsi kepelabuhanan PPN Pekalongan juga menggunakan Sarana Bantu Navigasi, serta pemenuhan Fasilitas Pelabuhan untuk mewujudkan keselamatan pelayaran. Maka berdasarkan latar belakang diatas penulis mengambil judul Skripsi: “Pengaruh Sarana Bantu Navigasi dan Fasilitas Pelabuhan Terhadap Keselamatan Pelayaran di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dalam penelitian ini merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh sarana bantu navigasi terhadap keselamatan pelayaran di PPN Pekalongan?
2. Seberapa besar pengaruh fasilitas pelabuhan terhadap keselamatan pelayaran di PPN Pekalongan?
3. Seberapa besar pengaruh sarana bantu navigasi dan fasilitas pelabuhan terhadap keselamatan pelayaran di PPN Pekalongan?

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengadakan penelitian terhadap sarana bantu navigasi dan fasilitas pelabuhan perikanan Pekalongan. Untuk menghindari perluasan pada masalah, maka di dalam skripsi ini penulis hanya membahas tentang sarana bantu navigasi dan fasilitas pelabuhan di mana

penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di kota Pekalongan dengan periode waktu penelitian sampai dengan bulan oktober 2016.

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi harus menentukan tujuan penelitian agar skripsi yang telah di buat memiliki daya guna. Tujuan penelitian tidak dapat dipisahkan dari latar belakang penelitian dan rumusan masalah. Adapun tujuan di buatnya penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui:

1. Besar pengaruh sarana bantu navigasi terhadap keselamatan pelayaran di PPN Pekalongan
2. Besar pengaruh fasilitas pelabuhan terhadap keselamatan pelayaran di PPN Pekalongan
3. Besar pengaruh sarana bantu navigasi dan fasilitas pelabuhan terhadap keselamatan pelayaran di PPN Pekalongan

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis
 - a. Dapat menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan pikiran dalam dunia kerja nantinya.
 - b. Melatih penulis bersikap kritis dalam mencermati permasalahan yang ditemui khususnya terhadap objek penelitian.
 - c. Memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Sains Terapan Pelayaran.
2. Bagi lembaga pendidikan (Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang)

- a. Sumbangan wawasan bagi pengembangan pengetahuan dari lapangan kerja khususnya dalam hal Sarana Bantu Navigasi, Fasilitas Pelabuhan dan keselamatan pelayaran.
 - b. Menambah kelengkapan dan pembendarahan kepustakaan.
 - c. Meningkatkan mutu dan kualitas lembaga pendidikan.
3. Bagi dunia praktis

Sebagai bahan informasi bagi para rekan-rekan pelaut yang ingin mengkaji permasalahan Sarana Bantu Navigasi, Fasilitas Pelabuhan dan keselamatan pelayaran.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam mengikuti alur rincian seluruh pokok-pokok permasalahan dan bagian-bagian skripsi yang berjudul “Pengaruh Sarana Bantu Navigasi Dan Fasilitas Pelabuhan Terhadap Keselamatan Pelayaran Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan” maka dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Di dalam skripsi ini juga tercantum halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar pustaka, dan lampiran.

Tak lupa pada akhir skripsi ini juga diberikan kesimpulan dan saran sesuai pokok permasalahan. Pada bagian isi dari skripsi ini terbagi menjadi lima pokok bahasan yaitu:

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Perumusan Masalah

- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

BAB II Landasan Teori

- A. Tinjauan Pustaka
- B. Kerangka Berpikir
- C. Hipotesis
- D. Definisi Operasional

BAB III Metode Penelitian

- A. Metode Penelitian
- B. Lokasi Penelitian
- C. Fokus Penelitian
- D. Tahap-Tahap Penelitian
- E. Sumber Data
- F. Metode Analisis Data

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Masalah

- A. Deskripsi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
- B. Hasil Penelitian
- C. Pembahasan

BAB V Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran